



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor SOP	12 /SOP/Sekre-BPSDM/2023
Tanggal pembuatan	3 Januari 2023
Tanggal revisi	4 Januari 2023
Tanggal pengesahan	5 Januari 2023
Disahkan oleh	KEPALA BPSDM PROVINSI SUMATERA BARAT DITR. DESNIARTI, MM NIP. 196508241990032001
Judul SOP	PENGAJUAN KONSEKUENSI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none">- Minimal Sarja- Menguasai Tata Pembukuan-Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima-Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Isian2. Komputer3. Pesawat Telepon4 Jaringan Internet5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Bila Prosedur ini ada yang melewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	Dicatat pada buku register keberatan

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

No	KEGIATAN	PELAKSANA			ATASAN PPID	MUTU BAKU	KETERANGAN
		PPID PELAKSANA	PPID	TIM PERTIMBANGAN			
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembantu					Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP
3	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyelesaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Draf Daftar Informasi yang dikecualikan; Daftar Informasi Publik
4	PPID Utama bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan
5	PPID Utama mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan					Draft Informasi yang Dikecualikan	Daftar Daftar Informasi yang Dikecualikan